
Premanisme di Kalabahi, Alor

Rahmat Gunawan

Staf Peneliti Yayasan Tangguh Hutan Khatulistiwa
Email: rahmad.gunawan@mail.ugm.ac.id

Abstract

This article looks at thuggery as an effort to gain recognition of existence and power in one group in the informal sector in Kalabahi City, Alor district. In order to see the contestation of thugs to build a patron-client role, this paper highlights the pattern of thuggery carried out in markets, terminals, and ports by explaining how thugs create patron-client relationships. This relationship has led to the dependence of economic sector actors on gangster groups in markets, terminals, and ports. In addition to creating patronage relationships between thugs and economic sector actors, thug groups also build reciprocity relationships among fellow thugs to strengthen their influence on the division of territories carried out by other thug groups.

Keywords: *thugs, patronage, contestation*

Abstrak

Artikel ini melihat premanisme sebagai upaya mendapat pengakuan eksistensi sekaligus kekuasaan pada satu kelompok di sektor informal di Kota Kalabahi, kabupaten Alor. Dalam tujuan melihat kontestasi para preman membangun peran patron klien, tulisan ini menyoroti pola eksistensi premanisme yang dilakukan di pasar, terminal dan pelabuhan dengan menjelaskan bagaimana para preman menciptakan hubungan patron-klien. Hubungan ini menyebabkan ketergantungan para pelaku aktivitas sektor ekonomi terhadap kelompok preman di pasar, terminal dan pelabuhan. Selain menciptakan hubungan patronase antara preman dengan para pelaku sektor ekonomi, kelompok preman turut membangun relasi resiprositas antar sesama preman untuk mengukuhkan pengaruhnya terhadap pembagian wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh para kelompok-kelompok premanisme lainnya.

Kata Kunci: *premanisme, patronase, kontestasi*

Latar Belakang

Masyarakat Kalabahi mempunyai pandangan yang beragam mengenai premanisme. Praktik premanisme yang dilakukan tidak melulu soal perampasan, kekacauan dan pembunuhan, namun lebih pada praktik-praktik perlindungan bagi orang-orang yang

bergerak di sektor ekonomi pasar tradisional. Mereka lebih merasa aman di bawah perlindungan para preman, dibandingkan para petugas pemerintah daerah sekitar, karena pola relasi yang dibangun kelompok preman berdasarkan atas asas 'perlindungan' atau 'keamanan'. Pola relasi ini membuat adanya ketergantungan antara kelompok preman dengan pedagang pasar, orang yang bekerja di pelabuhan dan orang yang mencari nafkah di terminal Kalabahi.

Keterlibatan setiap pelaku dalam hubungan ketergantungan itu akan terus berlangsung apabila mereka menjadi pengikut setia tokoh preman yang diposisikan sebagai patron (Gunawan 2017). Kekuasaan patron terhadap para pedagang di pasar, pelabuhan dan terminal cukup kuat, karena para preman dianggap sebagai pemberi perlindungan. Hubungan itu tidak selalu berkaitan dengan masalah materi, tetapi juga berkaitan yang non-materi, seperti pertukaran jasa (perlindungan) ataupun pertukaran pengaruh terhadap lingkup tertentu (Sairin dkk. 2002). Secara tidak langsung, hubungan timbal balik ini sebenarnya tidak memandang satu golongan tertentu dan menjadi alasan bahwa kehidupan sosial yang terbangun ternyata begitu susah ditebak.

Hubungan timbal balik (resiprositas) yang difasilitasi oleh institusi atau organisasi tetap berjalan dibawah sebuah kuasa (Polanyi 1944, 49). Kontrol kuasa juga terjadi pada pola hubungan timbal balik antara para kelompok preman dengan para klien-kliennya. Raharjo Jati (2012) menyebut kontrol kuasa yang dilakukan oleh preman terhadap kliennya, merupakan bentuk eksistensi satu kelompok preman untuk mendapat pengakuan dari kelompok preman lain. Di sisi lain, pengakuan dan hubungan baik kelompok preman dengan para klien itu juga merupakan penegasan terhadap eksistensi mereka di tengah masyarakat. Hal ini kemudian terus membuka kesempatan bagi mereka untuk menebar jaring-jaring kekuasaan di lahan yang potensial.

Tulisan ini bermaksud mengurai sisi moral kelompok preman yang sedang bergelut dengan benturan kehidupan serta dalam menghadapi stigma bahwa mereka adalah kelompok pembuat kerusakan dan dekat dengan perilaku kriminal. Fukuyama (2005) menelisik tentang dari mana datangnya moral, dan membuat kita berpikir bagaimana bentuk moral, kapan moral muncul, dan apa untungnya moral diterapkan. Pengalaman-pengalaman peristiwa yang kita alami mempengaruhi persepsi kita tentang moral. Nilai dan norma yang dilakukan sehari-hari sebenarnya merupakan sesuatu yang bersifat informal, tidak pernah diumumkan dan tidak dituliskan (Fukuyama 2005). Inilah yang menjadi aturan bersama untuk diketahui dan dijalankan bersama. Sedangkan, yang biasanya tertulis dan diumumkan ialah peraturan yang sifatnya hierarkis dari penguasa kepada subjek dalam sebuah negara. Peraturan ini biasanya berbentuk undang-undang tertulis dan diinformasikan. Berbeda dengan aturan hierarkis norma sosial rasional biasanya diajarkan secara lisan turun-temurun. Dalam konteks studi ini, kelompok preman memiliki beberapa kesamaan dalam penerapan aturan berdasar kesepakatan tidak tertulis. Inilah mengapa aktivitas premanisme biasanya selalu menuntut kesetiaan atau loyalitas yang tinggi dalam hubungan patron klien.

Disini saya berusaha fokus pada bagaimana praktik premanisme membentuk hubungan patron klien dengan memberikan gambaran mengenai pola-pola relasi yang terbentuk dan upaya yang dilakukan oleh kelompok preman dalam menunjukkan eksistensinya di sektor ekonomi di Kalabahi, Nusa Tenggara Timur.

Hubungan Patronase dan Kota Kalabahi

Studi ini diawali dengan observasi lapangan dan memadukan beberapa literatur yang relevan. Tahap selanjutnya, pendalaman isu dilakukan dengan melakukan observasi partisipasi dan wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber yang saya anggap sebagai aktor kunci dalam kelompok preman di pasar Kadelang, terminal dan Pelabuhan Kalabahi. Selama dua bulan, saya terlibat langsung dalam aktivitas para preman di sana untuk memahami pola relasi patron klien antara para preman dengan kelompok non-preman di ketiga lokasi itu.

Persoalan premanisme di Indonesia, sering ditemui di daerah-daerah padat penduduk yang terdapat potensial pertumbuhan sektor ekonomi formal maupun informal dalam relasi patronase. Sistem patronase merupakan pola timbal balik yang sudah ada pada masyarakat bercocok tanam dengan hak kepemilikan tanah. Hubungan ini terbentuk karena adanya kesepakatan, yaitu kewajiban yang harus dijalankan oleh orang-orang tertentu yang mendapatkan hak pemakaian tanah desa. Orang-orang yang disebut sebagai *kuli* dan *gogol*, misalnya mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu terhadap desa (Koentjaraningrat 1972).

Hubungan timbal balik antara patron (preman) dan klien sesungguhnya terjadi karena adanya kondisi yang saling membutuhkan. Praktik-praktik saling membantu dan kerja timbal balik ada di masyarakat adat maupun pada masyarakat negara bangsa dengan ideologi demokrasi atau sistem politik yang maju. Fenomena perilaku saling tolong menolong juga semakin erat kaitannya dengan studi perkembangan teori pertukaran sosial (Eisendstadt dan Roniger 1980, 42-44).

Hubungan patronase juga berbicara mengenai loyalitas, misalnya dalam studi tentang hubungan antara *Karaeng* dengan *Joa* di Sulawesi Selatan (Ahimsa-Putra 2007) yang menunjukkan begitu kentalnya rasa loyal para pengikut (klien) terhadap patronnya. Ketika 'Karaeng Bonto Kappang' pergi menghindari Belanda dengan naik perahu, ia tenggelam bersama perahunya di sungai. Hal ini telah mendorong penduduk sebuah kampung kecil, yang rupanya adalah pengikut-pengikutnya, untuk ikut mati melalui jalan bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangan mereka. Seperti yang tuliskan oleh Spoor (1925, 5-6) Kampung mereka selanjutnya dinamakan kampung *Turubela* (turu = ikut, bela = mati) karena kisah kesetiannya tersebut. Dari tulisan ini, kita dapat memahami bahwa, rasa kesetiaan terhadap sesuatu terbentuk setelah seseorang memperoleh sesuatu dari hubungan patron-klien tersebut. Yang terjadi kemudian ialah rasa kesetiaan yang memuncak dan dibuktikan pada kisah bunuh diri para pengikut *karaeng* tersebut.

Kemunculan orang-orang yang memiliki kekuasaan berbasis ekonomi menjadi fenomena menarik, sehingga kehadiran para preman membuat persaingan antar penguasa wilayah patronase semakin memanas. Ini ditunjukkan misalnya dari kemunculan 'mafia-mafia' yang menjadi aktor dalam tulisan Blok (1974) tentang kekerasan yang dilakukan oleh para 'pengusaha petani.

"Mafia was born of the tensions between the central government and local landowners on the one hand, and between the latter and peasants on the other. At the same time, however, mafia helped manage these distinct but interrelated tensions and struggles since it provided a specific code through which members of the various social classes and groups arranged themselves." (Blok 1974)

Penguat hubungan patron-klien hingga sampai pada puncak kesetiaan atau loyalitas juga pernah dibahas oleh Amri (2005) bahwa premanisme akan berjalan langgeng ketika masing-masing kelompok memiliki wilayah kekuasaan. Dalam hal ini, kepatuhan para klien yang menjadi roda penggerak dari legitimasi praktik kekuasaan para kelompok preman menjadi dapat dipertukarkan tergantung kebutuhan dan teritori yang dikunjungi para klien. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara patron dan klien menjadi semakin intensif dan kuat. Di sisi lain, aksi premanisme baru dapat muncul dan berkembang, karena adanya kekosongan wilayah penguasa yang belum terjamah (Amri 2005). Dengan demikian, sistem resiprositas umumnya dapat menjamin individu-individu terpenuhi kebutuhannya pada waktu mereka tidak mampu 'membayar' atau mengembalikan secara langsung atas apa yang mereka terima dan pakai (Swartz dan Jordan 1976, 479).

Dalam konteks studi saya, pasar terminal dan Pelabuhan di Kota Kalabahi, Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah sosial ekonomi strategis dan menjadi arena penting dalam perebutan wilayah kekuasaan para preman. Premanisme hadir dalam kelompok yang membangun sistem relasi hubungan patronase dalam aktivitas ekonomi. Resiprositas yang dibangun oleh para preman terhadap kliennya dalam hal ini pedagang di pasar, pekerja di pelabuhan dan terminal, merupakan dasar dari hubungan patronase yang tercipta. Timbal balik yang dipraktikkan berupa jaminan perlindungan keamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi dari gangguan kelompok preman lainnya. Dan timbal balik yang didapatkan oleh para preman sebagai patron adalah setoran uang keamanan, karena sudah menjaga aktivitas ekonominya dari gangguan kelompok preman lainnya.

Relasi patronase yang terbentuk antara preman dan para klien pada sektor sosial ekonomi di Kalabahi, tak ubahnya seperti yang disampaikan Kunio (1990) sebagai 'relasi perkoncoan' (*crony relationship*). Hal ini ditunjukkan dengan relasi yang berdasarkan tahu sama tahu, ketika preman telah memberikan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi kliennya, maka kliennya juga memberikan upah sebagai biaya perlindungan ke preman tersebut. Seiring relasi yang terbangun, kelompok preman seakan-akan membutuhkan pengakuan atas upayanya dalam memberikan perlindungan terhadap para kliennya dari gangguan kelompok preman lainnya. Pengakuan terhadap preman tersebut dianggap sebagai kunci bahwa para preman memiliki wilayah kekuasaan dengan motif perlindungan dan keamanan dalam melakukan aktivitas ekonomi di pasar, terminal, dan pelabuhan.

Premanisme dan Patronase

Secara etimologis, kata preman diadopsi dari bahasa Belanda, *vrijman* yang berarti 'orang bebas' sebagai bentuk dari aksi pergolakan oleh orang-orang yang pernah merasakan kerasnya rezim kolonial Belanda (Barker 1998). Aksi premanisme yang terjadi di Indonesia, seringkali dikait-kaitkan dengan citra kriminalitas, seperti yang digambarkan James Siegel (2000) bahwa preman kerap-kali melakukan aksi tindak kekerasan berupa ancaman ataupun teror perampasan harta benda, wilayah kekuasaan dan Tindakan kekerasan terhadap orang yang menduduki suatu wilayah dengan bentuk kekerasan, perampasan harta benda dan wilayah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapat pengakuan bahwa para preman memiliki power untuk praktik berkuasa pada suatu wilayah.

Saat ini, pasar tidak hanya menjadi arena persaingan dan perebutan keuntungan ekonomi, namun juga sebagai arena perebutan wilayah kekuasaan. Kegiatan ekonomi

juga dijadikan dasar mengapa hubungan patronase terbentuk, terutama dalam pertukaran pengaruh antar individu maupun kelompok. Maka dari itu, pertukaran pengaruh yang terjadi merupakan sebuah perluasan jangkauan kekuasaan tempat merealisasikan praktik-praktik patronase terhadap calon-calon klien dalam suatu wilayah yang strategis. Menurut Ortega, seorang preman yang saya wawancarai, pola patronase yang diterapkan pada kelompok preman terhadap kliennya di Kalabahi, dapat dianalogikan seperti hubungan timbal balik atas hak kepemilikan tanah yang terdapat pada masyarakat bercocok tanam di dekat pelabuhan Kalabahi. Ortega menjelaskan;

“Kalau seperti kami ini (para preman) yang mainnya di pasar, tidak ubahnya kayak orang-orang yang bertani lah. Jadi, pasti ada yang menjaga lahan pertaniannya. Makanya, karena kami ikut jaga lahan mereka, ya mereka juga harus kasih imbalan. Nah, imbalannya itu yang dibidang setoran untuk biaya jaga keamanan, dan itu sesuai kesepakatan dengan mereka.” (wawancara dengan Ortega, April 2016)

Biasanya, hubungan antara preman dengan para pedagang terbentuk karena adanya kesepakatan. Dalam hal pemakaian tanah desa, misalnya ada kewajiban yang harus dijalankan oleh aktor-aktor yang berpartisipasi di dalamnya. Ini sama halnya dengan kewajiban para klien preman-preman di Kalabahi yang memiliki kewajiban membayar upah perlindungan dan keamanan selama melakukan aktivitas ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ahimsa-Putra (2007), bahwa hubungan patronase ini mirip dengan hubungan kekerabatan, namun perbedaan norma membedakan hubungan keduanya. Norma yang terdapat dalam hubungan kekerabatan bisa dikatakan lebih bersifat relatif dalam hal mengendalikan hubungan atau interaksi kekerabatan. Sedangkan, interaksi hubungan timbal balik seperti patronase ini, lebih bersifat universal (Ahimsa-Putra 2007). Artinya, hubungan ini dapat mengandung dua unsur pokok yaitu membantu orang yang telah memberikan pertolongan dan tidak mengkhianati orang yang telah memberikan pertolongan (Gouldner 1977, 35). Hal ini menyadarkan kita bahwa hubungan patronase ini dapat terbentuk, jika antara satu pihak dengan pihak lainnya memiliki kesepakatan yang disetujui bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Anther, salah satu preman yang mengurus lahannya di Pasar Kadelang,

“Kesepakatan yang dibangun dari hubungan ini, ya karena kami (kelompok preman) sudah memberi bantuan menjaga wilayah cari makan mereka. Makanya, kalau mereka memainkan (berkhianat) dari kesepakatan yang sudah dibangun, ya sama aja cari masalah. Dan kami akan ganggu sampai rusak. Karena, kalau dari kawan-kawan sendiri yang kami kenal, mereka sudah tahu, jangan sampai berkhianat sama perjanjiannya. Soalnya, pernah kejadian masalah seperti itu, pas mereka ingkar janji mau mereka saudara atau kawan sendiri, tetap kami buat sama. Karena seperti itu yang ada jadi masalah aja untuk kami waktu kami tagih setoran.” (wawancara dengan Anther, April 2016)

Ikatan patronase semakin kentara, ketika salah satu di antara aktor yang terkait dalam hubungan ini telah memberikan pengaruh dan juga memberikan dampak terhadap orang yang mereka anggap penting dalam aktivitas ekonominya. Hubungan patronase yang dimaksud merupakan salah satu sistem pertukaran antara kelompok preman sebagai patron dengan kuli dan anak buah pekerja pasar, terminal dan pelabuhan sebagai

kliennya. Hubungan ini berkaitan erat dalam pola kehidupan suatu komunitas masyarakat yang memiliki relasi pertukaran pengaruh, dimana sistem pertukaran tersebut memiliki motif transaksional (Polanyi 1944, 49-55). Pertukaran pengaruh tersebut didasarkan pada harapan-harapan dan motif-motif yang ingin diperoleh para partisipan dalam praktik aktivitas ekonomi di pasar, terminal dan pelabuhan Kalabahi. Dalam percakapan kami, Ortega menambahkan;

“Biasanya, setoran yang diberikan oleh para buruh di pelabuhan, pedagang dan tukang parkir di Pasar Kadelang dan Kalabahi semacam uang keamanan. Jadi, uang keamanan itu yang buat mereka terjamin aktivitas untuk memperoleh ekonominya. Karena kalau mereka tidak kasih setoran, kalau ada gangguan dari kelompok preman lain mereka urus sendiri. Dan biasanya lebih yang terjadi semakin parah model setorannya, karena berharap perlindungan dari saingan kelompok preman lainnya. Jadi, kita tahu sama tahu sajalah, kayak teman sendiri.” (wawancara bersama Ortega, April 2016)

Penting untuk diingat bahwa preman seringkali hanya sebagai bentuk identitas sosial politis yang dimiliki seseorang. Dalam kesehariannya, preman juga tak ubahnya sebagai seseorang yang melakukan aktivitas-aktivitas lain dalam memperoleh pendapatan. Misalnya, aktivitas keseharian para kelompok preman di Kalabahi juga bergerak dalam upaya pelestarian lingkungan, yaitu tergabung dalam gerakan pecinta alam dan sesekali juga pernah menjadi pemandu wisata lokal. Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk positif atas perbaikan citra para kelompok preman, karena mereka tidak hanya bergelut tentang persoalan perebutan kekuasaan, tetapi juga turut-serta dalam membentuk citra daerah yang peduli, ramah dan saling menolong. Pada kenyataannya, apa yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi, tetapi sebagai bentuk upaya untuk memberikan hal yang baik demi pelestarian lingkungan Pulau Alor sendiri. Ortega mengaku,

“kadang susah juga mau buat baik, dorang mikirnya torang minta bantu untuk senang-senang torang saja, padahal torang juga bantu dorang semua untuk jaga lingkungan dorang. Itulah kadang mau buat baik saja tidak dipercaya, apalagi torang buat rusuh dan baku pukul minta dibantu. Abang juga kadang bingung kalau mau baku tolong sama dorang yang tidak percaya torang butuh bantuan juga, di kira torang bantu ini juga ada maunya saja, padahal memang iya juga (sambil tertawa bercanda), tapi tetap ada kalanya torang dan dorang saling baku tolong.” (wawancara dengan Ortega, April 2016)

Dengan demikian, praktik-praktik premanisme yang terbangun lagi-lagi menjadi suatu hubungan yang erat kaitannya dengan pola pertukaran antar patron dan klien. Motif pertukaran pengaruh inilah yang akhirnya melanggengkan praktik premanisme dalam aktivitas ekonomi di Kalabahi. Andil para preman dalam melakukan praktik premanisme dan resiprositas tersebut, lambat-laun menjadi sesuatu yang normal dalam lingkup aktivitas ekonomi karena dianggap saling mendapatkan keuntungan. Seperti yang sempat diungkapkan oleh salah satu preman terkait dengan aktivitas premanisme di wilayah-wilayah yang berpotensi besar perputaran ekonomi.

Kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sering sekali berurusan

dengan persoalan yang termasuk dalam kategori ilegal (premanisme), menjadi salah satu peluang kerja unggulan. Pekerjaan ini merupakan salah satu cara untuk menjadi penguasa wilayah, dimana wilayah tersebut merupakan tempat strategis (perputaran ekonomi) yang bergerak pada sektor informal. Maka dari itu, banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan tempat atau lokasi strategis tersebut. Terlebih lagi, persaingan antar individu dan kelompok yang berambisi untuk menguasai tempat-tempat penting yang strategis juga semakin memanas, yakni pasar. Kalabahi memiliki dua sentra pasar yang menjadi pergulatan besar hubungan saling sikut patron preman ini, yaitu di Pasar Kadelang dan Pasar Lippa/Tabakar (disebut Tabakar, karena pasar ini pernah terbakar). Pada setiap pasar lahan parkir juga menjadi salah satu wilayah kekuasaan para patron.

Memiliki pemimpin dalam sebuah hubungan patronase tentu akan mempermudah koordinasi antar-kelompok preman. Ortega menjadi bagian terpenting dalam hubungan ini sehingga citranya akan begitu superior di hadapan anak buahnya. Menjadi pemimpin kelompok di sektor informal, setiap kali hendak melakukan kegiatan baik, akan dipandang buruk oleh orang-orang yang mengetahui siapa Ortega sebenarnya. Predikat kejam dan pernah beberapa kali membunuh orang menjadi legitimasi atas praktik-praktik premanismenya tersebut. Sebagai orang yang asing, saya banyak mendengar berbagai pandangan orang-orang disekelilingnya.

Menjadi patron kelompok preman yang mengayomi geliat kehidupan anak buah dan para pengikutnya bukan hanya didasarkan pada kemampuan dalam baku pukul ataupun persaingan merebut daerah kekuasaan, tetapi juga karena ia memiliki kemampuan dalam mengelola bagaimana harusnya anak buah diperlakukan dan diberdayakan. Ortega sempat mengenyam Pendidikan tinggi hingga lulus sarjana dan berpengalaman dalam berkomunitas sebagai pecinta alam. Secara umum, Ortega dianggap berhasil mengambil hati anak buahnya dalam mengayomi mereka dalam praktik-praktik patronase tersebut sehingga akan terus dapat berlanjut dalam menjalin hubungan timbal balik. Seperti kata Kang Komar dalam sinetron berjudul 'Preman Pensiun' (2015)

“di bawah pemimpin yang baik, anak buah bodoh-pun ada gunanya. Tapi di bawah pemimpin yang bodoh, pasukan terbaikpun kocar-kacir.”

Cuplikan di atas mengindikasikan bahwa peran pemimpin dalam kelompok preman itu sangat penting sehingga hubungan yang dijalankan akan lebih terkendali jika ada yang berposisi sebagai pemimpin praktik. Beberapa studi kelompok preman seringkali mengaitkan kepiawaian kepala preman dalam mengorganisir anak-anak buahnya, terutama ketika dihadapkan dengan pola patron klien yang diterapkan seorang *boss* dalam memperlakukan anggotanya saat melakukan aktivitas premanisme. Jadi, pengaruh yang diberikan oleh anggota preman tidak semata-mata karena mengharapkan perlindungan, namun karena didasarkan pada sikap kepala preman yang dapat dijadikan panutan dalam hal kebaikan. Hal tersebut tidak hanya tercermin dari perbuatannya saja, tetapi juga dari sikap dalam melakukan suatu perbuatan.

Loyalitas dalam Premanisme

Hubungan antar-preman ini secara umum dilandasi asas pertukaran dan kesetiaan. Asas pertukaran mampu memberikan efek signifikan dalam kegiatan yang dilakukan, baik

yang bersifat terbuka maupun yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, proses yang berjalan membuat seseorang akan merasa diuntungkan, terutama pada mereka yang berperan sebagai patron. Menariknya, hubungan pertukaran dalam kelompok ini memiliki beberapa macam tipe. Pertama, hubungan yang didasarkan pada beban sosial, karena pernah diberikan pertolongan dan hubungan yang terbentuk akibat desakan kebutuhan. Kedua, hubungan berdasarkan utang budi yang harus dibalas, karena hubungan semacam ini dianggap sebagai beban moral dan beban sosial. Ketiga, hubungan yang tercipta karena adanya kebutuhan yang mengharuskan seseorang untuk meminta pertolongan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu, dari kelas sosial lebih tinggi dan memiliki kedudukan atau posisi yang lebih beruntung. Kemudian, pertolongan yang diberikan dibalas dengan cara mengabdikan dirinya kepada orang yang memberikan pertolongan tersebut. Dalam konteks tipe yang terakhir inilah salah satu hubungan yang terbentuk sebagai bentuk kesetiaan atas apa yang telah diberikan. Jika utang budi ini tidak terbalas, maka pihak yang semula menolong tidak akan lagi menaruh kepercayaan pada orang yang telah ditolongnya.

“Jadi, kami kasih mereka (para pedagang, buruh angkut dan penjaga parkir di pasar dan pelabuhan) tempat untuk cari makan dengan nyaman, tanpa diganggu oleh kelompok preman lainnya. Makanya, keamanan yang kami kasih ke mereka tidak cuma-cuma, harus ada balasan kepada kami. Selain tidak berkhianat dibelakang kami, mereka harus kasih setoran sebagai jaminan keamanan. Biasanya, tanpa diminta mereka sudah langsung tau, kalau kami datang bisa langsung kasih setorannya, tanpa harus dipaksa lagi. Makanya, setelah mereka kami terima setoran ya mereka sudah otomatis aman dari gangguan preman-preman lainnya.” (wawancara dengan Ortega, Juni 2016)

Motif praktik ini menjadi dasar keuntungan untuk para kliennya adalah karena perlindungan dan jaminan keamanan. Maka dari itu, kelompok preman biasanya saling memberikan pengaruhnya dengan cara seperti memberikan rasa aman bagi para pedagang di pasar, pelabuhan dan terminal di Kalabahi. Kekhawatiran akan keberlangsungan mencari nafkah pada sektor ekonomi, menjadikan keberadaan kelompok preman sebagai aktor pengamanan untuk pedagang di pasar menjadi diakui. Salah satunya dengan banyaknya para pedagang yang menjadikan kelompok preman di Kalabahi sebagai tenaga pengamanan lingkup dagangannya di pasar. Jadi, rasa aman dari gangguan kelompok preman lain menjadi keuntungan para pedagang, buruh angkut dan penjaga parkir, menjadi imbalan yang diterima karena sudah memberikan setoran ke para kelompok preman.

Lebih lanjut, persaingan atas perebutan lahan kekuasaan di Kalabahi merupakan salah satu pergolakan yang dapat kita temui dalam tujuan mempertahankan wilayah teritori kekuasaannya. Tidaklah mudah mempertahankan posisi sebagai pemegang sekaligus pengatur kendali kawasan di Kalabahi. Begitu-pula dengan hubungan antara lembaga pemerintah dengan preman yang ada kaitannya dengan persoalan ekonomi, dimana pihak Dinas Perdagangan atau Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan preman di wilayah tersebut. Persoalan ini sudah merupakan sebuah rahasia umum, seperti kasus tertundanya relokasi pasar ke lokasi yang lebih terpusat karena adanya jaringan negosiasi antara pihak penguasa lahan dan pihak dinas-dinas terkait.

Tarik-ulur relokasi ini menimbulkan tanda tanya besar dan kecurigaan, jika memang ada tangan lain yang bermain dibalik persoalan ini. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa premanisme dipraktikkan tidak hanya oleh para kelompok preman, tetapi juga oleh para aparatur pemerintah setempat dengan dalih sebagai bentuk pelancaran program. Potensi negosiasi yang seringkali menjadi cara terakhir untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik dalam bentuk ancaman maupun saling membuat keributan. Asumsinya, jika ada pihak yang tidak setuju atau merasa dirugikan, maka salah satu dari kedua pihak akan melakukan perlawanan. Namun, karena hal tersebut tidak terjadi, maka secara umum disimpulkan bahwa praktik ini dilakukan atas dasar saling “tahu-sama-tahu” dan juga sebagai bentuk kesetiaan dari hubungan patron-klien yang terjadi.

“[...] Setia-kawan dari relasi ini tidak dapat diukur dengan uang. Rasa setia itu akan terus melekat, teringat dan dapat dijalankan setiap saat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Sedangkan beda lagi halnya dengan harga atau uang, yang akan habis dan hanya dapat dinikmati sesaat saja. Tapi, nyatanya tetap saja bagi kami yang tergabung dalam kelompok preman ini bahwa uang adalah segalanya. Ya, kita memang tidak bisa munafik soal itu uang, tapi kalau sampai tidak setia-kawan berarti memang orang itu pantas banyak musuh. Tidak usah dibantu lagi.” (wawancara dengan Anther, April 2016)

Dapat kita pahami bersama, bahwa pertimbangan untuk saling memberi pengaruh akan mempengaruhi kesetiaan dan loyalitas terhadap relasi yang terbangun. Kurang lebih seperti yang disampaikan pada potongan percakapan diatas. Dengan demikian, relasi yang sudah terbangun menciptakan kesadaran atas kelompok yang saling bertukar pengaruh kesetiaan tersebut. Kesadaran ini yang akhirnya menjadi pengingat untuk terus saling memberikan pengaruh satu sama lain dalam hal gerakan penguasaan wilayah potensial ekonomi di Kalabahi, Alor. Oleh karena itu, hubungan pengaruh antar patron dan kliennya dalam wilayah kekuasaan ekonomi setempat ‘terkesan’ aman terkendali berkat upaya praktik premanisme tersebut.

Aktivitas Premanisme sebagai Jalan Kontestasi Peran

Situasi mendesak seringkali membuat kita berada dalam kurangnya pilihan untuk tetap melakukan aktivitas yang kita inginkan. Begitupun dengan aktivitas premanisme yang pada satu sisi sering menghadapi situasi perebutan wilayah kekuasaan dan perlu pengakuan kuasa dalam statusnya sebagai seorang patron. Perebutan kekuasaan pada sektor informal ini diungkapkan oleh Ortega, dimana:

“Rebutan wilayah kekuasaan dengan kelompok preman di Kalabahi, akhirnya jadi tempat rebutan pengaruh agar diakui oleh pelaku pasar dan pelabuhan. Jadi, rebutan wilayah itu kayak rebutan gengsi, siapa yang kuat dan bisa kasih perlindungan ke pedagang di pasar, ya dia yang diakui untuk bisa kasih keamanan ke pedagang, buruh angkut dan penjaga parkir. Makanya, kami (para preman) bisa punya banyak anak-buah dan tempat jaranan, karena rebutan sama kelompok preman lainnya juga.” (wawancara dengan Ortega, April 2016)

Oleh karena itu, kerap-kali perebutan wilayah kekuasaan antar preman menciptakan kekerasan dan kekacauan pada wilayah-wilayah potensial berjalannya aktivitas ekonomi

(Jati 2012). Dengan kata lain, bahwa kontestasi preman sering digambarkan pada perebutan wilayah kekuasaan yang berlatar-belakang ekonomi dengan persaingan antar kelompok preman atas dasar motif patronase dan perlindungan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, motif-motif yang mendasari pertukaran resiprositas dan redistribusi adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Dalton 1968). Kebutuhan ekonomi ini tidak dimaksudkan hanya untuk mendapat keuntungan semata, namun juga membangun relasi pertukaran pengaruh. Batasan dari pola resiprositas sendiri salah satunya pada pola pertukaran pengaruh sosial-ekonomi. Dalam pola pertukaran tersebut, setiap individu memberi dan menerima pemberian barang atau jasa karena kewajiban sosial (Dalton 1968). Secara utuh, pertukaran antar sesama kelompok preman, kelompok preman dengan petugas pengelola pasar dan pelabuhan yang terjadi akhirnya menjadi arena kontestasi para preman untuk menguatkan peran-peran preman ditengah-tengah perebutan wilayah aktivitas ekonomi di Kalabahi.

Aksi dari para preman ini merupakan rangkaian gerakan perlawanan terhadap satu peristiwa, salah satunya karena ketidakadilan penguasa dengan kelas sosial-ekonomi yang berbeda. Oleh sebab itu, lahirlah perlawanan yang tidak disangka-sangka terhadap penguasa yang disebut sebagai tindak atau praktek premanisme. Dan aksi premanisme ini bisa muncul, karena adanya kekosongan wilayah penguasa yang belum terjamah (Amri 2005). Namun dalam tulisan tentang persoalan protes atau perlawanan dari ulah premanisme ini, bukan karena disebabkan oleh ketidakadilan sosial-ekonomi yang berbeda, tetapi orang-orang yang disebut preman disini sendiri ada juga yang berasal dari keluarga yang terpandang, dan memiliki tingkat kelas sosial-ekonomi yang baik. Persoalan protes atau perlawanan ini bukan lagi seperti yang dipikirkan sebelumnya. Aksi ini terjadi karena mereka (preman) berpendapat bahwa, dengan kontestasi kepengaturan wilayah yang ada, mereka perlu mempertahankan kekuasaan untuk dapat menghindari konflik berkepanjangan di daerah tersebut. Metode yang mereka gunakan seringkali melewati batas aturan yang dianggap wajar oleh masyarakat pada umumnya.

Citra para preman yang terbentuk dari hubungan patronase tersebut sudah menjadi rahasia umum, bahwa terjadi manipulasi peran yang terselubung dalam melakukan praktik premanisme. Jadi, kelompok preman membangun relasi patronase dengan dalih bahwa hubungan tersebut hanya sebatas perlindungan biasa dari persaingan pasar dengan pedagang lainnya. Namun, lambat-laun ikatan patron kelompok preman terus berlanjut dan menyebabkan ketergantungan para pedagang, buruh angkut dan penjaga parkir terhadap preman menjadi sulit lepas. Oleh karena itu, cara pengikatan relasi di pasar dan pelabuhan ini akhirnya terkesan 'menjebak' dan bukan relasi pertukaran yang dianggap saling menguntungkan.

Pola pertukaran yang sudah terbentuk ini, terus berjalan karena sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan resiprositas umumnya berada dalam lingkup orang-orang atau kerabat dekat, sehingga yang terjadi ialah 'pemakluman' yang semata-mata adalah cara seseorang atau cara preman sebagai patron yang melindungi kliennya, bukan karena dilandasi harapan-harapan pengembalian. Studi Antropologi Ekonomi lebih banyak berurusan dengan gejala pertukaran yang bersifat tradisional yang tidak menggunakan mekanisme uang. Pertukaran tersebut terdapat pada masyarakat petani, misalnya pertukaran hadiah (*gift exchange*) perdagangan kula, dan *potlatch* (Mauss 1925).

Salah satu pertukaran yang paling sederhana dilakukan adalah yang berkaitan

dengan persoalan loyalitas dan uang. Sebuah pandangan bahwa nilai ‘uang’ adalah segalanya timbul karena terjadinya persoalan ekonomi. Mereka tidak akan melakukan praktik premanisme seperti itu, jika mereka benar-benar berkecukupan dengan uang dan cukup dalam memperoleh berbagai akses sosialnya. Bahkan Ortega sempat menyatakan dan membayangkan bahwa kehidupan yang cukup dengan uang itu ibarat kehidupan surga, Dia dapat melakukan apapun yang diinginkan dan juga membandingkan dengan keadaannya yang sekarang.

“..Torang tidak ada uang saja, bisa buat bergerak (melakukan praktik preman) sampai seperti ini, apalagi kalau torang punya uang berlebih, bisa saya beli itu pulau, untuk buat negara sendiri.” (wawancara dengan Ortega, April 2016)

Dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya persoalan kesetiaan dan uang itu menjadi pilihan yang dilematis bagi mereka, karena keduanya sangat begitu penting. Dalam obrolan-obrolan ringan dengan Anther salah satu preman yang memiliki perawakan lumayan menakutkan, tersirat bahwa Ketika ada pembicaraan mengenai perlawanan dirinya terhadap Ortega, ia tidak mau terlalu serius dalam menjawab pertanyaan tersebut. Terkadang situasi tersebut sulit dibedakan saat Anther sedang mengonsumsi minuman beralkohol atau sedang dalam keadaan sadar. Akan tetapi, setiap kali menjawab pertanyaan itu ia seperti menertawakan pertanyaan tersebut. Ia seperti mengisyaratkan bahwa ia sudah menemukan *partner* yang cocok dan sepemikiran dengan dirinya dalam melakukan praktik premanisme itu. Salah satunya berkaitan dengan pemberian perlindungan dari aktivitas sektor ekonomi dan tidak berpihak dengan kelompok preman lain dalam memperoleh perlindungan keamanan. Dengan demikian, dia tidak merasa perlu untuk membuat perlawanan terhadap Ortega lagi karena posisinya saat itu sudah begitu nyaman dan hanya tinggal menjalankan perintah saja dari seorang Ortega yang dapat menyediakan *backing* dibelakang aktivitas premanismenya.

Kontestasi Kelompok Preman

Pergesekan yang terjadi antar para kelompok preman sering terjadi. Namun, kontestasi peran sering juga ditemukan didalam kelompok preman itu sendiri, karena merasa telah berhasil mencapai tujuan tanpa menemui kesulitan dalam mengatur wilayah kekuasaannya. Hal ini didasari atas eratnya relasi antar sesama ‘kelompok preman di Kalabahi yang juga membangun ‘relasi perkoncoan’. Hubungan tersebut yang disebut oleh Ahimsa-Putra (2007) sebagai hubungan persekongkolan dalam kelompok preman.

Kehadiran para orang-orang yang memiliki kekuatan spesifik dengan jangkauan kekuasaan berbasis ekonomi menjadi fenomena khusus yang begitu menarik, sehingga kehadiran para preman membuat persaingan antar sesama penguasa wilayah kekuasaan yang semakin sengit. Kemunculan kelompok premanisme dalam persaingan perebutan wilayah kekuasaan tersebut yang pada akhirnya menjadi sumber potensi kekacauan baru (Blok 1974). Seperti perebutan wilayah dan lahan kekuasaan antar kelompok preman di pasar, pelabuhan dan tempat parkir. Kekacauan yang ditimbulkan, biasanya berupa gesekan dan tawuran antar kelompok preman, hingga sampai membuat kerusuhan di pasar yang akhirnya merugikan para pedagang yang tidak dapat berjualan di pasar.

Terlebih lagi, persaingan antar individu dan kelompok yang berambisi untuk

menguasai tempat-tempat penting dan strategis potensial ekonomi juga terjadi. Oleh karenanya, banyak cara yang dilakukan para preman untuk mendapatkan pengakuan atas kuasa tempat atau wilayah strategis tersebut. Model persaingan seperti inilah yang menyebabkan kontestasi peran kelompok preman menjadi arena pertunjukan pengakuan, siapa yang layak untuk menguasai suatu wilayah basis ekonomi, seperti pasar, terminal dan pelabuhan di Kalabahi.

Blok (1974) melihat kontestasi dari para preman merupakan rangkaian gerakan perlawanan terhadap satu peristiwa, salah satunya karena ketidakadilan pemerintah setempat dengan kelas sosial-ekonomi yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Ortega;

“Kami (para kelompok preman) sering tidak punya tempat untuk cari makan karena kami tidak sekolah, sehingga sering dianggap tidak berguna. Jadi, kami buat gerakan melawan yang akhirnya dianggap mengacau di pasar dan pelabuhan. Ya cara yang paling gampang jadi preman yang sok kuat, walaupun awalnya pasti berdarah-darah dulu, karena ketemu kelompok preman lainnya. Dan waktu itu, pas pasar juga lagi dibangun, jadi kami (kelompok preman) dapet tempat untuk jadi preman. Makanya, karena tau kalau perlakuannya tidak adil ke kami (para preman), jadi ada kesempatan untuk dapat diakui oleh pelaku ekonomi sekitar, makanya kami buat gerakan preman sekalian.” (wawancara dengan Ortega, Juni 2016)

Kemudian, lahirlah perlawanan yang tidak terduga terhadap pemerintah setempat yang diakui sebagai praktik premanisme. Aksi premanisme ini dapat muncul, karena adanya kekosongan wilayah penguasa yang belum terjamah (Amri 2005). Kontestasi yang muncul karena adanya kesempatan menguasai suatu wilayah, yang menjadi motif baru dalam upaya pangakuan perlawanan kelompok. Jika mengulik kaitannya dengan peran para preman dalam melakukan praktik premanisme, tentu akan berkaitan dengan hubungan resiprositas dan perlindungan untuk tetap dapat melakukan aktivitas sosial-ekonomi di wilayah strategis tersebut. Namun, yang menjadi hambatan bagi para preman-preman tersebut adalah masih adanya peran kuasa lain, yaitu pemerintah setempat sebagai pengelola wilayah administratif secara hukum negara.

Alasan para pedagang, buruh angkut dan penjaga parkir di Pasar Kadelang dan Pelabuhan Kalabahi enggan memilih perlindungan terhadap para preman, adalah bahwa jaminan yang diberikan oleh pemerintah setempat tujuannya hanya ‘mengakali’ (Siegel 2000) dan tidak dapat menjamin sepenuhnya perlindungan karena dibayang-bayangi dengan atribut Pemerintah Daerah. Petugas dinas pengelola pasar biasanya datang dan memungut setoran dari pedagang untuk pengelolaan kesejahteraan fasilitas pasar. Namun, kondisi pasar tidak mengalami perubahan dan perbaikan, sehingga para pedagang di pasar semakin tidak percaya dengan pemerintah dan berpikir bahwa oknum pemerintah atau dinas terkait hanya mengambil keuntungan pribadi dari pedagang saja.

Kemudian, dengan adanya batasan yang disadari oleh para kelompok preman tersebut preman-preman lebih memilih bermain aman dalam melakukan praktik premanisme. Salah satunya dengan model kompromi dan persengkongkolan antar kelompok preman lainnya maupun dengan pemerintah setempat dalam upaya melanggengkan aksi dan praktik premanismenya. Jadi, hubungan ‘tahu sama tahu’ antar kelompok preman dan dengan pemerintah setempat menjadi alasan untuk tetap menjalin relasi mengelola

perputaran uang di pasar dan pelabuhan. Maka dari itu, kompromi dengan dasar 'tahu sama tahu' tersebut yang membuat pengelolaan seperti ini tetap berjalan terus. Mereka saling menjaga lahan jarahannya masing-masing, baik di pasar, pelabuhan dan tempat perjudian. Karena perlindungan preman fokus pada orang yang berada di wilayah perputaran ekonomi (uang), maka para preman merasa sangat sensitif ketika bagian wilayah kekuasaannya diusik. Perselisihan dan persaingan yang terjadi juga sangat tergantung kepada siapa yang dapat mereka jadikan tempat berlindung saat mereka tidak dapat lagi mengatasi masalah yang mereka alami (Sairin dkk. 2002).

Perputaran uang juga begitu besar dalam wilayah-wilayah ilegal, biasanya yang berkaitan dengan perlindungan lokasi judi. Judi yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda dan masyarakat Kalabahi adalah 'bola bulat' (*billiards*). Saya sendiri pernah ditunjukkan bahwa dalam satu malam, perputaran uang dapat berkisar lima belas juta sampai dengan dua puluh lima juta rupiah. Penghasilan dari judi seringkali lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pekerjaan sebagai nelayan di masyarakat sekitar. Hal ini seringkali menimbulkan persoalan terutama masalah ketimpangan pendapatan. Situasi ketidakseimbangan ekonomi masyarakat sekitar Kota Kalabahi dengan perputaran uang yang notabene diawasi oleh para preman ini, menjadi semakin ironis. Hal ini, ditunjukkan dengan pola perlindungan wilayah yang tentunya membutuhkan jaminan baik dalam bentuk uang maupun jaminan kesetiaan terhadap kelompok preman. Jadi, tidak hanya pasar, terminal dan pelabuhan saja yang menjadi arena praktik premanisme dan patron-klienya, namun juga hingga ke ranah perjudian. Oleh karena itu, peran preman akhirnya menjadi lebih tampak, karena menjadi sosok yang dianggap memberi jaminan keamanan atas wilayah judinya tersebut.

Kesimpulan

Kehadiran kelompok preman di sektor informal secara tidak langsung menciptakan perubahan relasi pada struktur ekonomi di Kalabahi, terutama pada lingkup pasar, terminal dan pelabuhan. Seperti hubungan perlindungan dari aktivitas ekonominya, resiprositas dan patronase. Hal ini tentu saja mempengaruhi hampir setiap aktivitas yang terjadi di pasar, terminal dan pelabuhan Kota Kalabahi. Pola struktur yang awalnya hanya berkaitan dengan persaingan keuntungan pasar, kini mengalami perubahan yang beragam dengan hadirnya para kelompok preman dengan motif pertukaran dan patronase. Praktik premanisme akhirnya muncul sebagai gerakan sosial dengan tujuannya perlu pengakuan dari pelaku-pelaku aktivitas ekonomi di pasar, terminal dan pelabuhan bahwa mereka dapat memberikan pengaruh dan perlindungan. Salah satunya adalah dengan memberlakukan 'setoran uang preman' sebagai bentuk jaminan perlindungan dari pedagang kepada kelompok preman. Upaya untuk mendapat pengakuan dari pemerintahan setempat-pun dilakukan dengan cara melawan. Perlawanan yang dilakukan kelompok tersebut, berawal dari munculnya celah wilayah potensial yang kosong untuk dikuasai oleh preman.

Hubungan resiprositas dan patronase ini menjadi bentuk loyalitas kelompok dan pelaku-pelaku ekonomi dalam menciptakan satu kekuatan dalam kekuasaannya. Dengan memberikan 'setoran uang' dianggap menjadi syarat pemberlakuan keamanan dan perlindungan bagi pelaku ekonomi di lingkup pasar, terminal dan pelabuhan. Selain itu, hubungan patronase sendiri dilakukan sebagai upaya pengakuan atas pengaruh yang telah

diberikan kepada kliennya dan menjadikan pengaruh tersebut sebagai suatu hubungan yang mengikat. Para klien dengan menganggap kelompok preman tersebut benar-benar melakukan perlindungan dan pengamanan pada aktivitas ekonomi di pasar, terminal serta pelabuhan, sehingga tidak akan diganggu oleh kelompok informal lain yang mengatasnamakan keamanan dan ketertiban

Untuk mendapat pengakuan, kelompok preman tetap membuat kekacauan yang dapat menciptakan kerugian bagi orang lain. Di saat yang sama, mereka sebagai kelompok preman juga turut berpartisipasi dalam hal kebaikan, menawarkan dan memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan bantuan. Dalam mengupayakan kebaikan, para kelompok preman berharap hadir citra baru sebagai kelompok yang selalu dikait-kaitkan dengan tindak kekacauan dan meresahkan saja, namun juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hal ini yang sering sekali luput dalam menceritakan orang lain dalam setiap penelitian kita pada ilmu-ilmu sosial, dimana ketidakhadirannya sisi lain yang bersifat positif dalam subjek riset kita. Jadi, sisi kemanusiaan juga dimiliki oleh para kelompok preman layaknya sebagai bagian dari komunitas dalam ruang lingkup sosial.

Referensi

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2007. *Patron & Klien di Sulawesi Selatan, sebuah kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Amri, Ulil. 2005. "Preman-Preman Yogyakarta: Studi Antropologis Terhadap Fenomena Premanisme Kontemporer." Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Barker, Joshua David. 1998. *State of Fear: Controlling The Criminal Contagion in Suharto's New Orde*. Ithaca: SouthEast Asia Programme Cornell University Press.
- Blok, Anton. 1974. *The Mafia of a Sicilian Village, 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs*. Cambridge: Waveland Press.
- Dalton, George. 1968. "General: Primitive, Archaic and Modern Economies: Essay of Karl Polanyi." *American Anthropologist Journals* 70 (5): 966-969.
- Eisendstadt dan Roniger. 1980. "A Note on Patron-Client Theory." *Ethos* 12 (1): 30-36. <http://www.jstor.org/stable/640270>.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Geertz, Clifford. 1992. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawan, Rahmat. 2017. "Menjadi Preman: Memahami tentang Premanisme, Patronase dan Citra Preman di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur." Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ikmal, Moh, dan Mohammad Arifin. 2020. "Anarkisme Politik di Aras Lokal: Peran 'Bandit' Politik dalam Pilkades di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 6 (2): 123-152.
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok-Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Kunio, Yoshihara. 1990. "Kapitalisme Semu Asia Tenggara." Diterjemahkan oleh A. Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES.
- Mauss, Marcell. 1925. *The Gift*. London: Cohen and West.

- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation: The Political and Economics Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2012. "Kuasa dan Kekerasan: Kelembagaan Premanisme Yogyakarta Paska Reformasi." *Jurnal Sosiologi Islam* 2 (1): 61-75.
- Sairin, Sjafri, Pujo Semedi dan Bambang Hidayana. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siegel, James.T. 2000. *Penjahat gaya (orde) baru: Eksplorasi politik dan kriminalitas*. Yogyakarta: LKiS.